

PESANTREN TRADISIONAL, DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pradina Astuti

1. Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep tentang pesantren, demokratisasi pendidikan, dan bagaimana lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki kaitan erat dengan pengembangan masyarakat. Tulisan ini menelusuri dunia kepustakaan tentang pesantren dan pengembangan masyarakat secara umum untuk kemudian diekstraksi menjadi lebih spesifik dan dianalisis keterkaitan antara keduanya.

Sebagai bagian dari masyarakat global, pesantren diharapkan untuk melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai yang menjadi tuntutan masyarakat global. Di antaranya adalah sebuah sikap yang dapat menghargai dan menerapkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk keperluan tersebut, penting bagi setiap kiai dan pengurus pesantren untuk dapat menunjukkan kepada masyarakat akan arti penting pesantren sebagai wahana pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat dan membentuk pesantren berbasis multikulturalisme, yaitu sebuah pesantren masa depan yang menawarkan konsep baru bagi para santri untuk menghadapi tuntutan globalisasi.

Sebenarnya nilai-nilai seperti demokrasi, pluralisme dan HAM tidak terlalu berbenturan dengan pesantren. Terlebih jika kita melihat pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan pada mulanya dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam dengan tujuan utamanya adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan akhlak mulia bagi para santri. Karakteristik yang sangat menonjol di pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa dikatakan bersifat multikulturalis. Penyebabnya adalah karena pembelajaran di pesantren lebih menekankan pada karakter moral dan budaya lokal Nusantara, atau lebih spesifik lagi budaya masyarakat Jawa dan sebagian kecil

Sunda dan Madura. Sementara itu, wajah Islam yang ditransmisikan para kiai di pesantren pada dasarnya adalah Islam inklusif dan diharapkan menebarkan kedamaian di masyarakat. Para kiai pesantren biasanya juga meneruskan ajaran Walisanga yang mengajarkan sopan santun, toleransi dan menghormati budaya lokal. Bahkan, berkaca pada realitas sejarah, pada dasarnya pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral melalui transformasi nilai yang ditawarkannya. Kehadiran pesantren bisa disebut sebagai agen perubahan sosial yang sering melakukan kerja-kerja pembebasan pada masyarakat dari keburukan moral, penindasan dan kemiskinan. Selain itu, berdirinya pesantren juga memiliki misi untuk menyebarluaskan informasi ajaran universal Islam ke seluruh pelosok Nusantara yang berwatak pluralis (Saifudin Zuhri, 1999: 201).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sejak awal keberadaannya bertujuan hendak membina Muslim agar memiliki kepribadian Islami yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap, dan pola tindaknya. Oleh karena itu, dasar pendidikannya adalah pembinaan akhlak. Pada pesantren-pesantren tradisional, tujuan ini tidak dituangkan dengan eksplisit secara tertulis, tetapi secara implisit terekspresikan dari bahan pelajaran yang diberikan, proses dan cara pengajaran, dan norma-norma yang berlaku dalam interaksi pendidikan yang dikembangkannya (Rizal, 2011: 97). Hasil analisis Dhofier (1994: 21) tentang pesantren secara sosiologis menggambarkan tujuan pendidikan di pesantren sebagai berikut:

“Tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih, dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. Setiap murid diajar agar menerima etika agama di atas etika-etika yang lain. Tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang, dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada

mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan” (Dhofier, 1994: 21).

Rizal (2011: 98) mengelaborasi pendapat Dhofier dengan memaknai tujuan tersebut secara langsung diarahkan pada pembinaan kepribadian para santri sendiri sebagai hamba Tuhan yang harus memiliki akhlak mulia. Adapun pada pesantren-pesantren bercorak modern, yang telah merancang konsep pendidikan dengan manajemen pendidikan modern, tujuan pendidikan ini tereksplisitkan dalam dokumen tertulis. Dalam dokumen-dokumen tertulis tersebut tujuan bukan hanya pembinaan kepribadian semata, meskipun merupakan yang inti, tetapi secara eksplisit menegaskan profesionalisme dan kompetensi yang harus dikuasai oleh alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya (Rizal, 2011: 98).

2. Pengajaran di Pesantren

Pesantren, khususnya pesantren dalam format tradisional, memiliki sistem gradasi pendidikan dan kurikulum longgar (*non-fixed curriculum*) berdasarkan pada penguasaan kitab Islam klasik, artinya tidak dibatasi pada rentang waktu tertentu secara pasti, seperti triwulan, caturwulan, semester atau tahun ajaran (Rizal, 2011: 98). Menurut Dhofier (1994: 50-51), pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Oleh karena itu, gradasi pembelajaran dan kurikulum ditentukan oleh tingkatan kualitas kitab-kitab Islam klasik tersebut pada masing-masing disiplin keilmuan yang dikaji. Ia menggolongkan kitab-kitab Islam klasik tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu kitab-kitab dasar, kitab-kitab tingkat menengah, dan kitab-kitab besar. Menurut Rizal (2011: 99), kitab-kitab dasar diajarkan kepada para santri yang lebih muda yang telah menamatkan pengajian Qur'an, berisi ikhtisar ilmu-ilmu keislaman (disebut *mukhtashar*) dan prinsip-prinsip ketatabahasaan bahasa Arab. Kitab-kitab tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu sampai dua tahun. Santri yang mengaji kitab-kitab dasar ini dapat disebut sebagai santri tingkat 1. Kitab-kitab menengah

diajarkan kepada para santri lebih muda di tingkat lanjutan yang telah menamatkan kitab-kitab dasar berisi ilmu-ilmu keislaman yang lebih mendetail, meskipun belum bersifat analitik (sebagian berupa *mukhtashar* dari kitab-kitab besar) dan ketatabahasaan bahasa Arab yang sudah dapat diaplikasikan dalam menganalisis kitab-kitab yang dikaji dari sudut ketatabahasaan. Kitab-kitab tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua sampai tiga tahun. Santri yang mengaji kitab-kitab ini dapat disebut sebagai santri tingkat 2.

Kitab-kitab besar kemudian diajarkan kepada para santri yang lebih tua yang sudah menamatkan kitab-kitab menengah. Kitab-kitab tersebut berisi ilmu-ilmu keislaman yang mendetail, analitik, dan dalam konteks luas dan ketatabahasaan bahasa Arab yang kompleks karena pengecualian dan keragaman pandangan. Kitab-kitab tersebut diselesaikan dalam waktu tidak terbatas, tergantung ketebalan kitab-kitab tersebut, bahkan mungkin tidak diselesaikan dalam proses pembelajaran selama di pesantren, tetapi setelah keluar dari lingkungan pesantren. Kitab-kitab besar juga menjadi pilihan bagi santri-santri yang ingin memperdalam secara khusus suatu cabang keilmuan pesantren tertentu. Santri-santri yang mengaji kitab-kitab ini dapat disebut sebagai santri tingkat 3 dan tingkat *takhassus* (spesialisasi) untuk santri yang mengaji kitab-kitab cabang ilmu keislaman dan bahasa Arab tertentu. Tingkat *takhassus* ditentukan berdasar minat santri masing-masing dan bersifat sorogan (individual atas inisiatif santri atau saran kiai).

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan dengan disiplin keilmuan sebagai mata pelajaran adalah mata pelajaran-mata pelajaran yang berkaitan dengan masalah keagamaan (Islam) seperti fikih, keimanan (akidah), akhlak, tafsir, dan hadist beserta perangkat keilmuannya, seperti ushul fiqh, mushthalah hadist, ilmu tafsir, dan Bahasa Arab dengan segala perangkat keilmuannya, seperti tata bahasa (nahw), morfologi (sarf), dan stilistik (balaghah). Mata pelajaran-mata pelajaran ini dalam bentuk tradisionalnya menggunakan kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab yang di kalangan pesantren dikenal dengan istilah Kitab Kuning. Pesantren dengan tradisi penggunaan

Kitab Kuning ini disebut dengan pesantren salafiyah. Kitab-kitab Islam klasik pada pesantren-pesantren salafiyah-tradisional tersebut sekaligus berfungsi sebagai kurikulum pembelajaran pada masing-masing jenjang tingkatan santri. Berdasarkan kitab-kitab klasik inilah tingkatan santri dikategorikan (Rizal, 2011: 99-100).

Di masa sekarang, kebanyakan pesantren telah memasukkan pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya sebagai suatu bagian yang juga dianggap penting dalam pendidikan Islam (Rizal, 2011: 101). Namun, menurut Zarkasyi (2005: 71), pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih termasuk prioritas tinggi. Pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam. Dengan demikian, tingkatan suatu pesantren bisa diketahui juga dari jenis kitab-kitab yang diajarkan (Rizal, 2011: 101). Rizal (2011: 101) menyatakan bahwa pada pesantren yang memisahkan antara pengajaran kitab Islam klasik dengan pengajaran umum (sistem dualisme kurikulum), bentuk kurikulumnya menjadi dua jenis: (1) kurikulum berdasar pada target pembelajaran untuk mata pelajaran-mata pelajaran umum dan agama (Islam) yang bersumber dari buku-buku pelajaran agama dengan gradasi berdasar pada waktu; dan (2) kurikulum berdasar pada pilihan kitab-kitab Islam klasik yang dikaji dengan gradasi berdasarkan pada tingkat kesulitan kitab. Adapun pada pesantren yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan umum dalam struktur kurikulumnya, kitab-kitab Islam klasik ini dimasukkan bersama-sama dengan mata pelajaran umum lainnya yang ditetapkan batas waktu penyelesaiannya dengan gradasi berdasarkan waktu.

3. Demokratisasi Pendidikan dan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, menurut Zamroni (t.t.:127-130), dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen. Aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan

tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, pergeseran paradigma kerja guru dari tanggung jawab ke arah akuntabilitas dan pelaksanaan evaluasi dengan esei dan portofolio. Aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik guru dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya. Sementara itu, aspek manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah. Kedua, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat.

Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana paling strategis bagi penciptaan demokratisasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra (<http://www.kompas.com/%2Dcetak/0103/14/opini/pend04.htm>., diakses 14 Maret 2010), cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” adalah melalui apa yang disebut sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Selanjutnya Azra menegaskan, dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan “pendidikan kewargaan”, meskipun pendidikan kewargaan lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi. Namun yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan *civic culture* dan *civility* di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang otentik pada negara-bangsa Indonesia.

Sejalan dengan pendapat Azra, Syafii Maarif (dalam Zamroni, t.t.: viii-ix) mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya

dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu “demokrasi pendidikan” dan “pendidikan demokrasi”. Demokrasi pendidikan, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, dapat diwujudkan di antaranya melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Inilah yang disebut demokrasi pendidikan menurut Kartono (1997:196-197).

Adapun pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan di tingkat lokal (http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/28/menuju_masyarakat_madani_melalui.htm, diakses 13 Agustus 2010). Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidik dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu. Pendidikan demokrasi menuntut adanya perubahan asas *subject*

matter oriented menjadi *student oriented*. Proses pendidikan selama ini terkesan menganut asas *subject matter oriented*, yaitu bagaimana membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis mereka. Dengan orientasi seperti ini dapat dihasilkan lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil, tetapi kepandaian dan kecerdasan intelektual tersebut kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Keadaan demikian terjadi karena kurangnya perhatian terhadap ranah afektif. Padahal ranah afektif sama penting peranannya dalam membentuk perilaku peserta didik. Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan aspek egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik, maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peserta didik bukan saja memahami demokrasi tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam setting diskusi.

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing (dalam Jalal dan Supriadi, 2001:186) merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Dengan ini Sihombing menegaskan bahwa yang menjadi acuan dalam memahami pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan luar sekolah, karena pendidikan luar sekolah itu bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah. Ia dapat mengambil bentuk Pusat Kegiatan Belajar-Mengajar (PKBM) yang tumbuh subur dan masyarakat berlomba-lomba untuk mendirikan. Di seluruh Indonesia hingga tahun 2000-an

terdapat sekitar 760 PKBM. Hal senada juga diungkapkan oleh Supriadi (2000: 365-368) yang mengkaji fenomena TKA/TPA yang muncul di Indonesia semenjak 1980-an. Ia menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya ia tak perlu dikekang oleh aturan-aturan formal dari pemerintah.

Dari sini, fenomena TKA/TPA kiranya dapat dijadikan model alternatif bagi pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, terutama dari segi keterlepasannya dari birokrasi pemerintah. Ia senantiasa terwujud sebagai bukti dari akomodasi kehendak masyarakat untuk membelajarkan anak-anaknya. Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hanya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah (nonformal), sebagaimana diungkapkan Sihombing dan Supriadi di atas. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat dapat juga mengambil jalur formal, nonformal dan informal. Dalam kaitan ini, Gilbraith (<http://www.ed.gov/pubs/ PLLIConf95/comm.html>) menyebutkan: “*the concepts of community based education and lifelong learning, when merged, utilizes formal, nonformal, and informal educational processes*”. Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses formal biasanya merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi birokrasi formal semisal sekolah atau universitas. Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses nonformal dapat mengambil bentuk pendidikan di luar kerangka sistem formal yang menyediakan jenis pelajaran terpilih, seperti di perpustakaan atau museum. Adapun pendidikan berbasis masyarakat dengan proses informal merupakan pendidikan yang diperoleh individu melalui interaksinya dengan orang lain di tempat kerja, dengan keluarga, atau dengan teman.

Ada beberapa perspektif yang mencoba mencari landasan konseptual bagi pendidikan berbasis masyarakat. Perspektif historis melihat pendidikan berbasis masyarakat sebagai sebuah perkembangan lanjut dari pendidikan berbasis sekolah.

Perspektif ini dikemukakan oleh Surakhmad (2000:20) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan perkembangan lebih lanjut dari pendidikan berbasis sekolah. Dalam pandangannya, “konsep pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (PBS) adalah konsep yang sangat mungkin perlu kita dahulukan sebagai titik tumbuh konsep pendidikan berbasis masyarakat”. Diakui Shiddiqi (1996:12), analisis historis selalu menelurkan dua unsur pokok, yaitu periodisasi dan rekonstruksi proses asal-usul (*origin*), perubahan (*change*) dan perkembangan (*development*). Unsur yang ditekankan Surakhmad dalam analisisnya tentang pendidikan berbasis masyarakat ini adalah masalah perkembangannya, yaitu sebuah perkembangan yang muncul kemudian setelah lahirnya pendidikan berbasis sekolah. Dengan perspektif itu Surakhmad selanjutnya menegaskan bahwa yang dimaksud pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dengan sadar menjadikan masyarakat sebagai persemaian dasar perkembangan.

Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Selanjutnya Surakhmad menawarkan enam kondisi yang dapat menentukan terlaksananya konsep pendidikan berbasis masyarakat. 1) Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan. 2) Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat. 3) Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan mereka. 4) Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan bagi mereka. 5) Masyarakat sendiri telah aktif berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan. 6) Masyarakat sendiri yang menjadi pendukung pembiayaan dan pengadaan sarana pendidikan. Berbeda dengan Surakhmad yang melihat pendidikan berbasis masyarakat dari aspek titik-tumbuhnya, P.M. Cunningham (dalam Husen dan Postlethwaite, 1994: 900-901) memandang pendidikan berbasis masyarakat dari perspektif sosiologis. Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) merupakan hal yang kontras dengan pendidikan masyarakat (*community*

education) yang diselenggarakan negara. Kalau pendidikan masyarakat diartikan sebagai proses pendidikan untuk membangun potensi dan partisipasi masyarakat di dalam upaya proses pengambilan keputusan secara lokal, maka pendidikan berbasis masyarakat merupakan respon dari ketidakmampuan negara dalam melayani penduduknya untuk menyelesaikan berbagai aktivitas pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, rehabilitasi perumahan, pelayanan kesehatan, latihan kerja, pemberantasan buta huruf, dan maupun bidang pendidikan. Premis yang digunakan dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah bahwa pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kultur dan masyarakat tempat pendidikan itu terjadi. Ia senantiasa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat (*empowerment of communities*). Jarang terjadi pendidikan berbasis masyarakat dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Hal ini karena masalah pendidikan berbasis masyarakat itu menyangkut hubungan antara kekuasaan (negara) dan kemiskinan (masyarakat), bukan partisipasi warganegara (*citizen participation*) dalam pendidikan. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan pendidikan berbasis masyarakat adalah paradigma konflik. Sedangkan pendidikan masyarakat senantiasa berasaskan pada paradigma fungsionalisme. Paradigma ini mengasumsikan adanya “sekolah negeri” dan keinginan untuk menggunakannya secara efisien. Sekolah-sekolah ini dibuat agar menjadi sumber daya masyarakat, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

4. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Menurut Suharto (2005) terdapat tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu (1) pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) (2) perencanaan sosial (*social planning*) dan (3) aksi sosial (*social action*).

A. Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” daripada tujuan tugas atau tujuan hasil. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat yang bernuansa *bottom up*.

B. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, buta huruf, kesehatan dan lain-lain. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas”. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) atau kelompok rawan sosial ekonomi seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu bahkan wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima pelayanan” (*beneficiaries*). Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuat kebijakan, penentuan tujuan dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal. Para perencana sosial

dipandang sebagai ahli dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

C. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, pendistribusian sumber, dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi “korban” ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses maupun hasil. Masyarakat diorganisasi melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai perencanaan sosial perlu berlandaskan pada azas-azas:

1. Komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan
2. Mensinerjikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait dan partisipasi warga
3. Membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga, dan
4. Mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas (Ife, 1995 dalam Nasdian , 2003).

Konsep dan prinsip pengembangan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat
2. Pengembangan masyarakat yang penuh seimbang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multi tujuan
3. Perubahan sikap orang-orang adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan
4. Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat
5. Identifikasi, dorongan semangat dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program
6. Kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat akan memperkuat program-program pembangunan, memapankannya dalam basis yang luas dan menjamin ekspansi jangka panjang
7. Proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah
8. Penerapan program-program pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsian kebijakan yang konsisten, pengaturan administrasi yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilisasi sumberdaya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian, eksperimen dan evaluasi
9. Sumberdaya dalam bentuk organisasi-organisasi non pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional maupun internasional
10. Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional

5. Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987) dalam Hikmat (2001) pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Masih dalam Hikmat (2001), McArdle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang selalu konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses pengambilan keputusan. Aziz (2005) mengemukakan konsep pendekatan sosio kultural dalam pemberdayaan. Menurutnya pendekatan sosio kultural adalah salah satu pendekatan yang dilakukan sebagai upaya melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Di samping pendekatan sosio kultural ini, sering kali perubahan itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktural, yaitu pendekatan dari atas ke bawah. Aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat itu adalah agama, budaya, pendidikan, adat istiadat, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aspek-aspek itulah yang dalam proses perubahan sosial sering disebut dengan dimensi sosio kultural.

Di antara berbagai aspek tersebut setiap komunitas memiliki aspek yang dominan yang mempengaruhinya. Hal ini disebabkan oleh sistem nilai yang dipegang oleh masing-masing masyarakat. Misalnya pada masyarakat perkotaan yang paling berpengaruh adalah dimensi ekonomi dan pendidikan, sedangkan pada masyarakat desa biasanya adalah adat istiadat atau budaya setempat dan agama. Sedangkan pada

masyarakat santri nilai yang paling dominan berpengaruh adalah agama. Istilah perubahan sosial sesungguhnya mempunyai arti yang sama dengan pembangunan dan pemberdayaan. Hanya saja istilah pembangunan biasanya *bersifat top down* yang berarti masyarakat hanyalah sebagai objek dan sasaran dari pembangunan itu, sedangkan pemberdayaan biasanya menggunakan strategi *bottom up*. Artinya masyarakat sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada saat pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan itu.

Dengan demikian di samping menjadi objek dan pelaku pembangunan, masyarakat juga menjadi subjek dan pelaku pembangunan. Antara pembangunan dan pemberdayaan itu, keduanya merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Menurut Azis (2005) Ada beberapa tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan antara lain:

1. Membantu masyarakat dalam menentukan masalahnya
2. Melakukan analisa atau kajian terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif)
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan
4. Mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio kultural yang ada dalam msyarakat
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya

Oleh karena masyarakat sendiri yang paling mengerti kebutuhannya, maka dari itu agen-agen perubahan itu harus berasal dari masyarakat itu sendiri. Pihak luar hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam proses perubahan dan pemberdayaan tersebut. Proses pemberdayaan dapat berupa penekanan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kemampuan agar individu menjadi lebih

berdaya. Selain itu proses pemberdayaan masyarakat lainnya adalah penekanan pada proses menstimuli, mendorong, atau memotivasi individu agar lebih mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Konsep keberdayaan ini ditinjau dari segi sosial dan ekonomi yang berarti kemampuan dalam menjalin pola-pola hubungan sosial yang mencakup hubungan antara individu-individu di dalam kelompok ataupun antar kelompok itu sendiri serta kemampuan untuk membebaskan diri dari ketergantungan pihak luar, mampu meraih, memanfaatkan dan mengembangkan diri dari sektor sosial ekonomi yang tersedia.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pranarka dan Vidyandika (1996) dalam Hikmat (2001) menyatakan bahwa dalam pergeseran aliran pembangunan, pusat perhatian bertumpu pada manusia dan kebutuhan menurut ukuran mereka sendiri, bukan sebagaimana yang diperkirakan para praktisi pembangunan pada masa lampau. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural-politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*).

6. Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat

Kendala yang selama ini memperlambat dan menghambat program yang dilakukan oleh pesantren pada kelembagaan ekonomi dan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap teknologi yang kurang, dalam hal ini pesantren belum memiliki teknologi canggih untuk proses produksi maupun pengolahan hasil pertaniannya, seperti: traktor, alat pengering padi dan alat penggiling padi.
2. Akses terhadap modal yang kurang dalam hal ini masih banyak pihak bank masih yang enggan memberikan pinjaman terhadap pesantren jika digunakan sebagai modal mengembangkan agribisnis.
3. Akses terhadap distribusi, saat ini pondok pesantren belum memiliki target pasar untuk produk yang dihasilkan. Sehingga produk hasil pertanian masih diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan internal.
4. Perhatian dari pihak pemerintah yang dinilai sangat kurang. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian yang dinilai masih sangat kurang memberikan dukungan baik moral maupun material. Badan Penyuluh Pertanian (BPP) sangat jarang memberikan penyuluhan, walaupun ada, hal itu dilakukan semata-mata karena pihak pesantrenlah yang mengundang mereka.
5. Faktor harga yang tidak menentu juga menjadi alasan mengapa pesantren belum terlalu mengutamakan hasil pertaniannya untuk dijual.
6. Faktor alam, untuk pertanian keadaan tanah yang kering dan juga kurangnya air menjadikan tidak semua jenis tanaman bisa ditanam, pesantren harus pintar menyesuaikan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Sedangkan untuk perikanan adanya angin selatan yang bertiup pada bulan Desember sampai bulan Februari. Angin ini menyebabkan ikan enggan bertelur selain itu jika terjadi hujan yang terus menerus maka telur ikan enggan menetas. Hal ini menyebabkan produksi ikan cenderung menurun.

Setiap aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan orang lain (banyak orang), dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Yang

kemungkinan besar berbeda adalah cara dan pendekatannya, sesuai dengan latar belakang kehidupan aktornya (A'la, 2007). Upaya pengembangan kelembagaan pesantren yang dilakukan oleh banyak pesantren adalah jelas merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Pesantren sebagai lembaga yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat memiliki pendekatan yang khas dan berbeda dengan lembaga lain dalam melakukan program pengembangan masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh pesantren adalah pendekatan melalui metode dakwah. Hal ini terbukti merupakan metode yang efektif untuk pengembangan masyarakat karena masyarakat melihat contoh nyata dari pesantren yang membuat masyarakat segan dan lebih mudah untuk pesantren menjalankan program pengembangan masyarakatnya. Potensi pesantren sebagai agen perubahan sosial di pedesaan memang sangat strategis, karena masyarakat telah memiliki kepercayaan bahwa pesantren memberikan ajara-ajaran yang berlandaskan agama. Di samping secara umum pesantren berada di tengah-tengah masyarakat, hubungan dengan masyarakat juga sangat dekat. Pesantren secara umum menjadi semacam tempat bertanya bagi masyarakat, tidak hanya dalam soal-soal keagamaan, tetapi juga sosial keagamaan. Itulah yang dikenal sebagai dakwah, yakni seruan kebajikan yang diwujudkan dalam tindakan nyata (Haedari, 2007). Melalui metode ini pesantren semakin memiliki posisi yang kuat di masyarakat karena program-program yang dibuat sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan sosio kultural yang merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan sebagai upaya melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya (Aziz, 2005).

Pedesaan yang merupakan basis utama pesantren dan masyarakat pendukungnya adalah masyarakat yang telah terbuka terhadap perubahan dari luar. Arus informasi yang begitu gencar dari berbagai media mengakibatkan masyarakat mudah menerima bahkan meniru informasi dari luar baik yang positif maupun negatif. Media

menampilkan berbagai gaya hidup modern yang menjadikan masyarakat desa menjadi lebih sulit dibina. Gaya hidup yang ditampilkan oleh berbagai media massa lama-kelamaan mulai mengikis nilai-nilai yang ada pada masyarakat desa termasuk nilai-nilai pada segi keagamaan. Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangi perkembangan zaman (Saefurrohman, 2005). Berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk pelatihan/workshop (*daurah*) yang lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja adalah upaya untuk menambah wawasan santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis. Hal tersebut merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di lingkungan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan masyarakat, maka pondok pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa, jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga santri yang dibekali dengan berbagai disiplin ilmu keterampilan lainnya, guna dapat diwujudkan dan mengembangkan segenap kualitas yang dimilikinya. Banyak pesantren yang pada awalnya merupakan pesantren salafiyah, namun dalam perkembangannya banyak pesantren bertransformasi menjadi pesantren semi salafiyah atau juga semi-modern. Kategori ini adalah pesantren salafiyah dengan manajemen atau pesantren modern dengan tetap mengkaji kitab kuning selain pelajaran umum yang dikembangkan dengan sistem sekolah berdasarkan kurikulum yang dipadukan dengan kurikulum dari pemerintah (Asmani, 2003).

Sebagai lembaga yang menaruh perhatian terhadap kemajuan masyarakat, banyak pesantren yang memiliki program pengembangan kelembagaan yang dimiliki sebagai upaya turut serta dalam pengembangan masyarakat, yaitu:

A. Peran pesantren misalnya di bidang spiritual, sampai sekarang ternyata belum bisa digantikan oleh lembaga-lembaga pendidikan lain. Dengan bermodal keikhlasan dan keteladanan, kiai pesantren telah menunjukkan keberhasilannya dalam mentransfer nilai-nilai relegius kepada santrinya, dan juga bahkan kepada masyarakat (A'la, 2007). Pemberdayaan santri memberi dampak kepada peningkatan pendidikan masyarakat desa, hal ini karena pesantren memberi kesempatan pada santri yang berasal dari golongan menengah ke bawah dan tidak menuntut biaya pendidikan, pesantren juga memberikan keterampilan santri tersebut melalui bidang agribisnis yang sedang dikembangkan pesantren karena mereka bekerja pada lahan pesantren setelah belajar. Adanya program Wajar Dikdas memungkinkan masyarakat memperoleh pendidikan secara gratis dan akses internet yang terbuka bagi masyarakat desa menjadikan masyarakat lebih bisa terbuka kepada teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan dan fasilitas yang memadai tersebut memungkinkan masyarakat desa mengalami peningkatan pengetahuan. Pengembangan kelembagaan pendidikan di pesantren melalui peningkatan dan kelengkapan fasilitas menjadikan banyak pesantren memiliki santri yang semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di pesantren.

B. Pesantren memiliki standar keberhasilan dalam setiap program yang mereka susun.

Dalam hal pengembangan kelembagaan ekonomi, standar keberhasilannya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi penggarap atau memelihara hewan ternak milik pesantren. Walaupun tidak dibuktikan secara matematis, namun terdapat perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi penggarap atau memelihara hewan ternak milik pesantren ke arah yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari memelihara hewan milik pesantren yang membawa dampak pada ekonomi rumah tangga masyarakat itu sendiri. Banyak pesantren saat ini sedang membangun untuk

kepentingan agribisnis dan juga sebagai tempat untuk menampung anak yatim. Pembangunan ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sebagai buruh bangunan yang tentunya mereka bisa bekerja tanpa harus meninggalkan keluarga dan juga tanpa harus mengeluarkan uang makan dan transportasi karena tempat bekerja dekat dengan tempat tinggal.

Selain itu, keberadaan pesantren dengan jumlah santri yang cukup banyak dengan kebutuhan yang beragam memungkinkan santri menjadi konsumen warung-warung kecil yang ada di sekitar pesantren, sehingga warung-warung tersebut tidak perlu merasa khawatir kehilangan konsumen karena pesantren terus melakukan regenerasi santrinya. Contoh lain, pengembangan agribisnis yang dilakukan selama ini hasilnya dirasakan pula oleh masyarakat sekitar. Masyarakat ikut serta menikmati hasil panen dari pertanian yang dikembangkan pesantren. Sebagai contoh ketika pesantren menanam tomat dan hasil panen yang didapat cukup besar yaitu satu ton, dan kebetulan saat itu harga tomat sedang sangat jatuh, pada saat itu pesantren lebih memilih memberikan hasil panennya kepada seluruh masyarakat desa dibandingkan dengan menjualnya ke tengkulak. Hal ini dilakukan berangkat dari asumsi bahwa jika hasil panen dibagikan kepada masyarakat desa maka akan lebih barokah dan mendapat nilai di mata Tuhan daripada menjualnya kepada tengkulak dan merugi. Ini juga merupakan salah satu bentuk kesalehan social yang dipraktikkan oleh pesantren.

Contoh lainnya yang juga sangat jelas adalah adanya Unit Simpan Pinjam (USP) yang dikelola oleh KOPONTREN yang memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman modal tanpa bunga yang memberatkan karena masyarakat tidak dibebani oleh bunga pinjaman karena itu merupakan hal yang dilarang oleh agama. Karena hal ini merupakan prinsip-prinsip yang dipegang oleh pesantren menurut fiqih muamalah yang bersifat tetap antara lain: tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada saling menzalimi antara lain tercerminkan dalam prinsip bagi hasil (Hafidhudin, 2003).

7. Kelembagaan Sosial Keagamaan

Pembinaan masyarakat yang dilakukan melalui pengajian dengan cara menyebar santri ke seluruh pelosok desa maupun pengajian rutin di mesjid pesantren lambat laun memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat desa. Para ustadz biasanya membacakan suatu ayat dalam Qur'an, hadist atau kitab kemudian menjelaskan kandungannya dan aplikasi terhadap kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang diajarkan oleh ustadz-ustadz secara perlahan diaplikasikan oleh masyarakat desa pada setiap segi kehidupan. Hal ini terjadi karena upaya pembinaan dan dakwah yang dilakukan oleh pesantren. Program pengembangan kelembagaan pesantren masih memberi prioritas pada pemberdayaan santri dibandingkan pada masyarakat sekitar, walaupun melibatkan masyarakat sekitar namun keterlibatan masyarakat masih sangat kecil dibandingkan keterlibatan santri karena santri merupakan unsur penting bagi eksistensi sebuah pesantren sehingga sebuah pesantren tanpa santri ibarat mobil tanpa sopir. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Turmudi (2004) bahwa santri adalah sumber pendukung bagi kiai dan pesantren. Santri tidak saja penting bagi eksistensi pesantren pada saat ini tapi juga untuk menjamin eksistensi di masa mendatang. Santri tidak hanya dibekali ilmu-ilmu agama tetapi juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti komputer, pertanian, menjahit dan hal lainnya yang diharapkan akan menjadi bekal santri jika mereka sudah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan terjun ke masyarakat.

Di banyak pesantren, keterampilan seperti ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Disadari atau tidak bahwa kecenderungan untuk mengembangkan pengetahuan non-agama di pesantren merupakan kebutuhan nyata yang harus dihadapi para lulusan pesantren di masa depan. Justru tantangan untuk berlomba menguasai pengetahuan non-agama merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pondok pesantren (Wahid dalam Anwar dan Matahari, 2001). Dengan demikian, tujuan pengembangan pesantren adalah mengintegrasikan pengetahuan agama dan non-agama, sehingga lulusannya memiliki kepribadian yang

utuh dan komprehensif. Akhirnya, keluarannya adalah manusia yang mampu memandang jauh ke depan sekaligus memiliki keterampilan praktis. Pemberdayaan santri ini pun masih kurang melibatkan partisipasi aktif dari santri. Hal ini terjadi karena santri hanya ikut serta dalam pelaksanaan program tanpa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan dan pengambilan keputusan masih dipegang sepenuhnya oleh pemimpin pondok pesantren. Partisipasi santri ini dapat dikatakan sebagai partisipasi pasif atau manipulatif (Syahyuti, 2005) karena santri tidak terlibat dalam keseluruhan program mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan. Pemberdayaan yang sesungguhnya meletakkan partisipasi aktif kedalam efektivitas, efisiensi, dan sikap mandiri. Menurut Payne (1979) dalam Nasdian (2003) pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya kuasa untuk mengambil keputusan dan menentukan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Pemberdayaan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh sekumpulan maupun individu. Namun yang paling dekat dengan kita, dan yang paling mudah dipahami bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial (Maulana, 2007).

Pemberdayaan di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Praktiknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam

masyarakat itu sendiri. Sebagai pesantren tradisional, keputusan kiai masih sangat dijunjung tinggi, karena memang selama ini kiai memegang peranan yang sentral dalam setiap program yang dibuat karena selama ini apa yang dirancang kiai sangat visioner dan penuh inovasi, bahkan banyak pimpinan pondok pesantren saat ini memiliki rencana untuk lebih mengembangkan pesantren dengan cara ingin mengembangkan varian-varian lain dari bisnis pesantren. Santri mengaku hanya menjalankan perintah yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren, walaupun santri terlibat dalam penyusunan program terkait dengan program yang dijalankan, namun tetap pengambil keputusannya adalah pimpinan pondok pesantren.

Kiai merupakan orang yang sangat dihargai keputusannya, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Horikoshi (1987) yang mengemukakan fungsi kiai antara lain sebagai pemangku mesjid dan madrasah, pengajar dan pendidik, dan sebagai ahli dan penguasa hukum. Dalam hal ini kiai sebagai pimpinan pesantren merupakan seseorang yang merupakan ahli dan penguasa hukum yang mutlak. Selain sebagai pengambil keputusan pada setiap program yang disusun, pengaruh kiai tidak hanya di lingkungan pesantren saja namun juga di lingkungan sekitarnya hingga pada tingkat desa. Hal ini dikarenakan kiai sebagai pimpinan pesantren sangat aktif dan terlibat dalam pemerintahan desa, yang dibuktikan dengan jabatan yang dimiliki kiai selain sebagai pimpinan pondok pesantren juga merupakan tokoh masyarakat. Terlepas dari pengaruh kiai yang begitu kuat namun partisipasi dalam proses pemberdayaan amatlah penting, karena partisipasi dan pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan dan juga merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya (Hikmat, 2001).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, inti dari partisipasi adalah keterlibatan langsung anggota masyarakat dalam seluruh proses program pengembangan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah kehidupan mereka sendiri. Partisipasi sangat penting dalam program

pengembangan masyarakat agar masyarakat merasa dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan pembangunan. Namun partisipasi memiliki berbagai tipe, ada yang benar-benar murni partisipasi masyarakat adapula partisipasi masyarakat yang bersifat semu. Menurut Syahyuti (2006) partisipasi yang baik itu adalah partisipasi yang disebut dengan partisipasi interaktif, di mana masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Pola ini cenderung melibatkan metoda indisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

Dengan menerapkan konsep partisipasi, banyak hal positif yang didapatkan dalam penerapan program pengembangan masyarakat yaitu efisiensi dan efektivitas program baik dalam segi biaya, waktu dan materi. Titik awal perubahan sosial yang ingin dicapai oleh banyak pesantren adalah melalui pemberdayaan santri. Santri diberi kekuasaan mengatur bidang yang diamanahkan oleh kiai untuk dikembangkan. Dengan cara ini, kemampuan santri dapat dilihat dari berkembang atau tidaknya bidang yang diamanahi tersebut, dan juga bagaimana santri dapat memetic pelajaran dari kegiatan yang dilakukan yang pada akhirnya akan membuat santri menjadi siap untuk terjun langsung menerapkan pengetahuannya di luar pesantren. Hal tersebut terjadi karena pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu mereka yang diberdayakan memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam kegiatan sosialnya juga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan (Suharto, 2005).

8. Pengembangan Kelembagaan Pesantren sebagai Bagian dari Upaya Pengembangan Masyarakat

Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang tangguh dan sampai saat ini masih bisa bertahan serta terus menerus memperbaiki dirinya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki basis sosial yang sudah sangat jelas dan sangat akrab dengan masyarakat. Di saat lembaga lain belum berjalan secara fungsional, pesantren berada pada garda depan sebagai pusat aktivitas masyarakat, mulai dari belajar agama, bela diri, mengobati orang sakit, konsultasi pertanian, mencari jodoh bahkan menyusun strategi untuk melawan penjajah. Pesantren juga merupakan lembaga yang memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pada zaman dahulu pesantren bahkan memproduksi tinta dan kertas yang dibuat dari bahan tradisional untuk menulis pelajaran. Namun, seiring perkembangan zaman yang terjadi, kegiatan produksi tersebut terhenti karena tergantikan oleh kertas dan tinta yang diproduksi oleh pabrik yang harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Pesantren hidup dari, oleh dan untuk masyarakat, hal ini menuntut adanya peran pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa dan negara yang terus berkembang. Pesantren dapat berperan sebagai motor penggerak perubahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai metode yang dimilikinya.

Secara umum, pesantren sangat berperan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Banyak pesantren merupakan lembaga yang menambah panjang deretan pesantren yang memiliki andil dalam memperbaiki lingkungannya ke arah yang lebih baik. Fokus utama pengembangan agribisnis di pesantren adalah sebagai upaya turut serta dalam mengembangkan pertanian dan sebagai upaya memberantas kemiskinan. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh lahan pertanian yang cukup luas dan sebagian besar masyarakatnya pun bermata pencaharian sebagai petani maka program yang disusun tidak jauh dari bidang agribisnis yang memang sudah lekat dengan masyarakat. Sebenarnya, Indonesia juga adalah negara bahari, tetapi pengoptimalan potensi bahari Indonesia belumlah terlalu signifikan, sehingga sepak terjang pesantren di dalam pemberdayaan masyarakat pesisir belum terlalu dapat diformulasikan dengan tepat. Berangkat dari keprihatinan terhadap negara

Indonesia yang merupakan negara agraris namun saat ini negara belum mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya dan masih mengimpor dari negara lain yang bukanlah negara yang memiliki sumberdaya yang banyak seperti Indonesia. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mandiri pesantren mencoba untuk memulai dan mengembangkan pertanian dalam skala kecil yang diharapkan nantinya akan memberikan sumbangan besar bagi bangsa.

8. Kesimpulan

Pemberdayaan santri merupakan salah satu upaya yang dilakukan banyak pondok pesantren dalam pengembangan kelembagaannya. Santri diberikan pengetahuan tidak hanya ilmu agama tapi juga diberikan keterampilan yang bersifat umum seperti komputer dan pertanian. Santri bekerja pada lahan pertanian setelah mereka belajar sehingga tidak mengganggu aktivitas utama mereka di pesantren. Selain memberdayakan santri, pesantren juga memberikan kesempatan pada masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah untuk ikut serta dalam pengembangan kelembagaan pesantren. Pemberdayaan santri dan masyarakat ini menunjukkan bahwa pesantren tidak “egois” dalam melakukan perbaikan, karena pesantren bukanlah lembaga eksklusif yang tertutup bagi dunia luar. Pesantren telah turut serta memperbaiki kehidupan masyarakat desa pada bidang pendidikan, pertanian, ekonomi dan sosial keagamaan. Pada tataran pendidikan pesantren memiliki program Wajar Dikdas 9 tahun yang tidak hanya diperuntukkan bagi santri tapi juga bagi masyarakat sekitar. Pengembangan kelembagaan ekonomi dan pertanian memberikan dampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa. Pengembangan kelembagaan dalam bidang sosial keagamaan memberikan kontribusi terhadap perubahan akhlak dan moral masyarakat desa melalui pengajian yang semakin berkembang. Pengembangan kelembagaan pesantren dalam rangka pengembangan masyarakat sebagai cikal bakal perubahan yang nantinya akan menciptakan perubahan yang lebih besar pada masyarakat, bangsa dan negara.

Hal yang pertama dilakukan adalah memaksimalkan potensi-potensi yang ada, mulai dari sumberdaya alam sampai sumberdaya manusianya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural karena pesantren merupakan lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih bisa diterima dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan perubahan. Hal yang membuat pendekatan ini berhasil adalah karena program yang selama ini dilakukan pemerintah sangat kuat ditandai oleh model yang sentralistik dan mengikuti jalur birokratis. Dalam sistem semacam ini kendati elit politik selalu mengatakan bahwa pembangunan mengutamakan *bottom up planning*, mendahulukan musyawarah dari bawah, namun pada kenyataannya pembangunan lebih didominasi oleh keinginan dan kepentingan pemerintah (Usman, 2003). Hal yang menjadikan pesantren berbeda dengan lembaga lain adalah di mana dalam pesantren, dengan kepemimpinan kiai dan para ustadz serta pengelolaan yang khas, tercipta satu komunikasi tersendiri yang di dalamnya terdapat semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya dan organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya dinamika pesantren dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan dinamika masyarakat.

Saat ini perhatian pemerintah pada upaya pesantren dalam rangka turut serta dalam pengembangan masyarakat dinilai masih belum optimal. Hal ini terbukti banyak pesantren yang merasa kurang mendapatkan penyuluhan pertanian padahal penyuluhan merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi bidang pertanian yang saat ini sedang digalakkan. Pemerintah masih cenderung memberikan perhatian pada pesantren yang lebih modern yang berada di kota besar dibandingkan dengan pesantren tradisional yang berada di desa. Oleh karena itu, pesantren tradisional harus sekuat tenaga mengoptimalkan potensinya dan berjalan sendiri tanpa ada perhatian dari pemerintah. Pada saat ini, keberadaan pesantren tidak memiliki kewenangan langsung untuk merumuskan aturan sehingga perannya dapat dikategorikan sebagai partisipasi.

Dalam hal ini, pesantren melalui kiai dan santri didikannya cukup potensial untuk menggerakkan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, untuk lebih mengembangkan potensi pesantren, maka diperlukan dukungan dari berbagai elemen mulai dari masyarakat maupun pemerintah. Melalui kerjasama ini dukungan moral dan material akan mempercepat perubahan. Sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, pesantren harus terus disegarkan agar tidak kehilangan relevansi pada jaman yang telah berubah dengan sangat cepat. Pesantren harus lebih peka dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga pengembangan kelembagaan yang dilakukan adalah benar-benar hal yang dibutuhkan masyarakat.